

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kita dapat menyepakati bahwa teknologi dan informasi punya peran penting dalam memainkan fungsinya dalam pembangunan negara-negara berkembang pada umumnya, terutama di masyarakat terpencil yang termarginalkan ditengah kota. Ada banyak program yang bisa memberikan alternatif untuk mengurangi kesenjangan digital di daerah terpencil. Hal ini juga memberikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dll. Pemerintah Indonesia sendiri memahami pentingnya pemerataan akses terhadap teknologi dan informasi, khususnya internet. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kominfo Meluncurkan program Internet untuk memasuki desa/desa Internet (Alfandya & Wahid, 2021)

Namun ada banyak faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi proyek teknologi informasi. Khusus untuk program Desa Internet, respon dan kebijakan masyarakat akan menjadi penting. Infrastruktur yang tersedia, namun keinginan masyarakat sendiri tidak mendukung, akan berujung pada kegagalan. Pengaruh peserta utama dalam proses pengenalan teknologi dan informasi sangat menentukan keberhasilannya. Evolusi penggunaan teknologi di masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan perekonomian di wilayah sekitarnya. Minimnya minat dari pemerintah daerah menuntut masyarakat memiliki daya pikir dan daya saing untuk

mengembangkan daerah di masyarakat. Kreativitas dan pengetahuan masyarakat menjadi nilai penting untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah. Salah satu desa yang menjadi cikal bakal *cyber village* pertama di Indonesia adalah Kampoeng Cyber yang terletak di kawasan khusus Yogyakarta dengan lokasi yang strategis di sekitar kawasan wisata Tamansari.

Dari penjelasan literatur terdahulu yang sudah berkesempatan meneliti tentang Inisiatif Komunitas Lokal Membangun Kampung Cyber di Kota Yogyakarta (2014) dikatakan bahwa Kampoeng Cyber sangat diakui oleh masyarakat, Keberadaan Kampoeng Cyber juga dapat menarik minat masyarakat yang semula tidak menguasai sistem jaringan komputer, internet, dll. Kini dapat berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan untuk meningkatkan pasar. Dengan demikian, komunitas Desa Internet kini memiliki keterampilan yang lebih dibandingkan desa lainnya. Namun, banyak kendala dalam mengelola sumber daya yang ada, dan kurangnya dana yang tersedia membuat sebagian masyarakat tidak dapat mengembangkan usahanya secara optimal. Terlepas dari kurangnya minat dari pemerintah kota dan lokal, desa Internet masih memiliki masalah, terutama dalam hal pendanaan.

Dengan banyaknya dinamika yang telah terjadi di Kampoeng Cyber maka yang jadi hal menarik adalah pola kerjasama yang sudah dilakukan pemerintah dengan komunitas lokal dalam mendongkrak kesadaran masyarakat kepada pentingnya Internet, apalagi mengingat untuk mewujudkan konsep tatanan Society 5.0 yang berbasis kepada sentralisasi peran manusia dalam mengelola teknologi. Sejak digagahi nya kampoeng cyber pada tahun 2006, sampai saat ini sudah

banyak terjadi pengembangan secara kuantitas pendukung peralatan dan kualitas masyarakat yang tinggal di Desa Internet tersebut.

Komunikasi dan interaksi dengan masyarakat juga telah berubah, dengan penggunaan media sosial memudahkan untuk berkoordinasi dan terus memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk mempermudah pengelolaan pesan dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya akan disingkat menjadi RT & RW di Kampung Cyber juga dibuat sistem informasi pengelolaan pesan yang bekerjasama dengan pihak Kelurahan. Penerapan teknologi informasi dari tahun 2008 hingga saat ini bukanlah waktu yang singkat, dan inilah salah satu alasan penggunaan Kampung Cyber sebagai contoh dalam penelitian ini, dimana strategi dan kendala, serta dampak yang dihasilkan dari penerapan tersebut. Kerja sama atau kolaborasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan pemerintah kelurahan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan pertimbangan pengembangan untuk penelitian ini. Pada tahun 2008, teknologi informasi masih baru, terutama di pedesaan, sama sekali tidak mengenal teknologi. Bagaimana sebuah desa/desa dapat berhasil menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi bukanlah tugas yang mudah. Kebutuhan ini erat kaitannya dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk menentukan strategi implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat digunakan sebagai benchmark untuk daerah tertinggal/pedesaan lainnya.

Tentunya dengan konsep besar yaitu mengembangkan desa berbasis digital di Kampung Cyber memerlukan kerjasama antar beberapa pemangku kebijakan agar supaya pengembangan Kampung Cyber tersebut bisa terwujud dengan maksimal, maka dari beberapa Pemangku kebijakan tersebut perlu untuk ikut

perpartisipasi proaktif sebagai setiap instrumen pengembangannya. Dalam penjelasan penelitian ini juga menjabarkan terkait siapa saja aktor yang terlibat didalam pengembangan Kampung Cyber dan bagaimana proses dari *collaborative governance* yang diajalankan oleh tiap aktor yang terlibat.

Dalam praktik manajemen pemerintahan modern, kerja sama tentu penting dan perlu. Dalam hal ini, Collaborative Governance adalah sesuatu yang lahir dari berbagai inisiatif masing-masing pihak untuk memaksimalkan proses politik yang sedang berjalan, dan juga mampu menghasilkan solusi yang saat ini meresahkan masyarakat. Ini juga sebagai bentuk optimalisasi konsekuensi dari berbagai kegagalan kolaboratif yang memakan banyak biaya dan sulit dikelola. Berbagai interpretasi yang ada tentu memperkuat klaim bahwa Collaborative Governance tidak hanya muncul, tetapi berasal dari berbagai lapisan masyarakat dengan kepentingan yang berbeda pula. Kolaborasi ini juga penting bagi ilmu pengetahuan, yang dalam konsep ini melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam hal pengembangan Kampung Cyber yang dulunya merupakan pemukiman desa biasa dan kini menjadi contoh kampung berbasis digital di Indonesia, tentunya banyak pihak yang turut andil dalam keberhasilan tersebut. Dalam hal Collaborative Governance sendiri, ada tiga unsur yang bekerja sama untuk mencapai keberhasilan kebijakan, dalam hal ini pengembangan Kampung Cyber. Kelahiran Kampung Cyber berawal dari kepedulian Ketua RT 36 RW 09 Taman, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta yang akrab disapa Pak Koko melalui proses *go online* dengan memasang koneksi internet dirumah tiap-

tiap warga yang. Warga setempat melihat sadar bahwa kehidupan bermasyarakat di era digital tidak lepas dari pengaruh teknologi, warga setempat juga berniat untuk mengejar ketertinggalan itu dengan beradaptasi dan memanfaatkan internet untuk media komunikasi dan informasi lainnya.

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis disini tertarik dan merasa penting untuk mengadakan mini riset tentang strategi bagaimana Kampung Cyber dalam memasifkan kesadaran pentingnya Teknologi dan Informasi di Era sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat sehingga dapat dijadikan acuan dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan masyarakat di daerah lain. Untuk membuat penelitian ini lebih fokus dan berorientasi pada sector Collaborative Governance. Karena dari beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang Kampung Cyber belum banyak yang menyoroti collaborative governance yang dilakukan, terlebih yang menjadi menarik adalah adanya kebijakan atau program yang diadakan oleh pemerintah untuk mengembangkan kampung cyber tersebut. Diharapkan juga dapat melengkapi penelitian yang berfokus kepada strategi pengembangan desa tersebut dalam menciptakan melek teknologi kepada masyarakat sehingga penulis tertarik untuk permasalahan tersebut kepermukaan dengan judul : Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampoeng Cyber di Kelurahan Patehan Kota Yogyakarta

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang diatas, penelitian ini merumuskan masalah

tentang bagaimana Collaborative Governance dalam mengembangkan Kampoeng Cyber di Kota Yogyakarta. Dari beberapa fenomena yang telah terjadi di Kampung Cyber disinyalir menjadi suatu terobosan terkini dalam menciptakan masyarakat yang melek akan teknologi, mengingat kehidupan masa kini perlu merespon dengan sigap atas akselerasi perkembangan teknologi. Dengan ini dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana keterlibatan aktor dalam proses *collaborative governance*?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan siapa aktor yang terlibat dalam pengembangan Kampoeng Cyber menggunakan pendekatan collaborative governance dan menjelaskan tahapan kolaborasi dari masing-masing dalam mengembangkan Kampung Cyber dalam prespektif collaborative governance di Kampoeng Cyber, Patehan, Kraton, Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta.

#### D. Manfaat Penelitian

Terdapat tiga manfaat yang bisa dikategorikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini secara teori diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi dalam pembangunan ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan khususnya tentang peran komunitas local serta masyarakat desa dalam membangun sebuah benih perkembangan peradaban berbasis teknologi, dan dapat menyelesaikan masalah seputar teknologi di Kampung tersebut maupun

daerah lain yang bisa mengadopsi Gerakan social semacam ini.

## 2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah masukan atau acuan bagi daerah lain untuk dapat pro aktif dalam membangun kesadaran teknologi di daerahnya masing-masing. Juga dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta ntuk turut serta melahirkan trobosan-trobosan terbaru di daerah seluruh Nusantara, terkhusus Kampoeng Cyber, Patehan, Kraton, Kota Yogyakarta.

## 3. Bagi Penulis

Merupakan salah satu bentuk upaya untuk mempraktekkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan kedalam kondisi sesungguhnya.

## E. Studi Pustaka

Penelitian yang dilakukan bertujuan utnuk melengkapi penelitian sebelumnya serta bertujuan untuk meningkatkan hasil penelitian sebelumnya. Tujuan membandingkan penelitian mahasiswa adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa dapat diterima sebagai asli atas ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan, sehingga tidak ada plagiarisme, dan beberapa prinsip ilmiah masih berlaku. Pada banyak penelitian yang sudah dilakukan dengan tema tentang strategi penerapan tekologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan desa, maka perlu perbandingan yang sebanding agar dapat mengembangkan kembali kualitas dari penulisan yang ada.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Amirrudin et al., 2021) yang berjudul *The Development Of Education Character Policy And Programs In Information Society*

*Of Kampung Cyber Yogyakarta*, dan jurnal dari (Sidqi et al., 2022) yang berjudul *Strategi Pengembangan Kampung Seni Dan Budaya Jelekong, Kabupaten Bandung*, kemudian jurnal dari (Wahid, 2020) yang berjudul *Strategi Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Pembangunan Studi Kasus : Kampung Cyber Yogyakarta*, selanjutnya jurnal dari (Pramudita, 2018) yang berjudul *Pengelolaan Kampung Cyber Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Berbasis Masyarakat Dan Teknologi Di Yogyakarta*, dan yang berikutnya jurnal dari (Oktafiani & Wijaya, 2017) yang berjudul *Kajian Pengaruh Pengembangan Tik Di Kampung Cyber Terhadap Tingkat Kenyamanan (Studi Kasus: Kelurahan Patehan, Yogyakarta)* di mana dari lima jurnal tersebut membahas tentang bagaimana di Kampung Cyber tersebut strategi apa yang digunakan untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, juga bertujuan untuk menjadikan desa tersebut menjadi desa wisata yang dapat menarik banyak wisatawan dari luar. Sedangkan yang sedang dilakukan peneliti yaitu berfokus pada bagaimana Collaborative Governance dalam mengembangkan masyarakat yang melek teknologi.

Pada jurnal yang ditulis oleh (Riyana & Pratiwi, 2021) dengan judul *Digital Parenting Pada Anak Usia Dini Di Kampung Cyber*, dan dari jurnal (Wahidin, 2018) dengan judul *Peran internet dalam mewujudkan digital citizenship (Studi di kampung cyber kota Yogyakarta)*, kemudian dari (Suryani, 2017) yang berjudul *“Republik Hot Ngelesot” Sebagai Wujud Penerapan Program Cyber City Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pada Program Cyber City Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)*, selanjutnya jurnal dari (Khoir &



Davison, 2019) dengan judul *The art of good neighboring in Kampoeng Cyber: Community economic development through ICTs*, dan jurnal berikutnya yang ditulis oleh (Correa & Pavez, 2016) yang berjudul *Digital inclusion in rural areas: A qualitative exploration of challenges faced by people from isolated communities*. Dari lima jurnal yang dijelaskan memang beberapa menggunakan Bahasa Inggris karena memang merupakan jurnal luar negeri, dapat disimpulkan dari penelitian sebelumnya tersebut bahwa penulis terdahulu menitikberatkan pada pembahasan terkait peran internet dalam membentuk karakteristik masyarakat dan juga cara mendidik anak dengan tantangan percepatan teknologi yang mana apabila tidak di dampingi dengan baik maka dapat membahayakan psikologis anak tersebut dimasa depan. Sedangkan lagi-lagi yang ingin ditulis oleh penulis dikesempatan kali ini adalah tentang Kerjasama antara masyarakat di desa Kampung Cyber dengan Pemerintah untuk mengembangkan desa tersebut.

Didalam jurnal yang ditulis oleh (Yunanto, 2017) dengan judul *Inisiatif Komunitas Lokal Membangun Kampung Cyber Di Kota Yogyakarta*, dan dari jurnal (Tremblay, 2019) dengan judul *Kampoeng Cyber: Community-Based Internet Development In Post-Suharto Indonesia*, kemudian dari penulis (Salam & Zuliana, 2021) yang berjudul *The Sensibility of Cyber Community in The Multicultural Space: Reading the Practice of Digital Ethnography in Kampoeng Cyber Jogja*, selanjutnya dari penelitian (KAWENGIAN, 2017) dengan judul *"Tingkat Literasi Dan Pemanfaatan New Media (Internet) Pada Masyarakat" Kampoeng Cyber" Rt. 36 Taman, Kelurahan Patehan*), selanjutnya penelitian yang ditulis oleh (Wulandari et al., 2021) yang berjudul *The Formation of Digital Citizenship Ethics Through Kampung Cyber Civic Community*. Dari literatur tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sementara pendekatan Kampoeng

Cyber muncul baru dan unik untuk pembangunan berkelanjutan, praktik masyarakat mewakili kesinambungan dengan masa lalu Jawa. Praktik ekspresi budaya dan pergeseran yang terjadi dalam wacana pembangunan Indonesia selama beberapa dekade terakhir membentuk arahnya. Transisi ini memerlukan pengalihan ekstensif. Melalui praktik promosi verbal, branding informal, dan penciptaan identitas online, masyarakat Kampung Cyber telah membawa perhatian lokal, nasional, dan internasional (dan patron rendah hati dari berbagai donor) untuk upaya pengembangan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas internet dan literasi lingkungan. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis berfokus kepada pendekatan Collaborative Governance untuk mengembangkan potensi di Kampung Cyber tersebut dengan dukungan literature terdahulu juga tentunya dan kaidah kepenulisan lainnya.

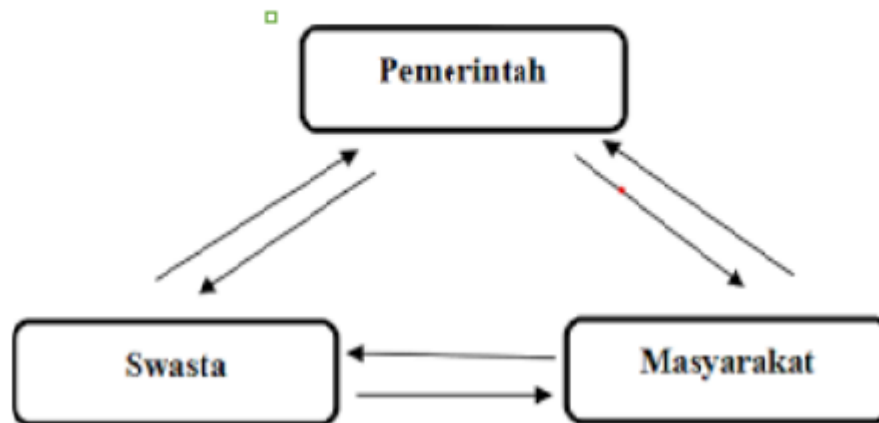
Dari penjelasan beberapa paragraf diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian sebelumnya yang sama menjadikan Kampung Cyber sebagai objek penelitiannya adalah penelitian yang ditulis oleh penulis kali ini menitikberatkan kepada peran pemerintah dan Collaborative Governance dalam pengembangan Desa/Kampung Cyber tersebut dengan bantuan komunitas local sebagai pelaku utama. Sedangkan selama ini banyak penelitian yang menyoroti persoalan inisiatif dan kreatifitas masyarakat setempat.

## F. Kerangka Teori

### 1. Collaborative Governance

Collaborative governance adalah evolusi dari konsep manajemen bertujuan untuk mencapai kinerja yang jelas dan tujuan yang spesifik dalam mengembangkan

(Yunas & Nailufar, 2019) Collaborative governance merupakan pengelolaan koperasi, dan pekerjaan yang mengatur lebih dari satu lembaga pemerintah untuk berkomunikasi langsung dengannya pemangku kepentingan non-publik dalam langkah pengambilan keputusan bersama yang berorientasi formal dan konsensual dan perdagangan target uraian dan pelaksanaan kebijakan publik, serta pengelolaan program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008)



Gambar 1.1 Pola Kerjasama Governance

Sumber: Abidin Dkk 2013

Dari diagram di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam proses manajemen bersama, 3 peserta harus berpartisipasi, mempengaruhi proses. Artinya pemerintah dalam hal ini bukan lagi satu-satunya aktor yang berusaha menyelenggarakan administrasi publik secara sepihak, tetapi bekerjasama dengan pihak swasta maupun masyarakat, misalnya pihak swasta, dengan dukungan dana, harus ikut andil dalam pengelolaan pemerintah (Bila & Saputra, 2019)

Sesuai dengan aturan sebelumnya, *collaborative governance* adalah suatu proses di mana organisasi yang berbeda dengan kepentingan dalam masalah tertentu harus mencari solusi bersama sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan cara mereka sendiri. Ini adalah penekanan pada pemecahan masalah secara kolaboratif, di samping fakta bahwa berbagai pihak yang berunding bersama tidak terbatas pada organisasi pemerintah dan non-pemerintah, tetapi dapat melibatkan masyarakat sipil dalam pembuatan dan adopsi kebijakan (Zaenuri et al., 2015).

Dari berbagai definisi yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada tiga dimensi demokrasi, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil (Yunas & Nailufar, 2019).

Terdapat beberapa tahapan kerjasama dalam konsep pengelolaan bersama, dan tahapan yang berbeda tersebut sangat penting untuk pengelolaan urusan publik yang maksimal, dalam hal ini proses kerjasama masih sulit untuk dilaksanakan karena padahal, setiap pemangku kepentingan berbeda karakter dan kepribadiannya. Pada proses kolaborasi ini Ansel dan Gash memberikan gambaran setiap prosesnya. Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dialog Tatap Muka

Dalam berbagai dialog tatap muka tentang pengelolaan bersama dengan masing-masing pemangku kepentingan yang ada, dialog ini penting karena sebenarnya merupakan proses pengelolaan bersama yang berorientasi pada proses yang juga mampu menganalisis peluang yang berbeda dan saling menguntungkan.

Fungsi dari proses dialog ini juga untuk meredam arogansi di antara para politisi sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal untuk saat ini.

## 2. Membangun Kepercayaan

Dalam proses kerjasama sangat penting untuk membangun kepercayaan, di awal kerjasama tidak jarang para pemangku kepentingan masih memiliki rasa kepercayaan yang kurang, dalam proses membangun kepercayaan ini harus menjadi prioritas, sehingga jika kerjasama pertama dilakukan, kepercayaan sudah ada. Pemangku kepentingan tidak dikendalikan oleh keegoisan antardepartemen. Di tengah semua itu, sangat dibutuhkan pemimpin yang bisa mewujudkannya.

## 3. Memberi Pemahaman

Komitmen yang kuat juga diperlukan dalam proses kolaboratif itu sendiri, karena hal ini mendorong partisipasi dalam pengelolaan bersama. Fungsi dari kewajiban ini adalah untuk mencegah risiko yang timbul dari kerjasama.

## 4. Komitmen Untuk Menunjang Proses

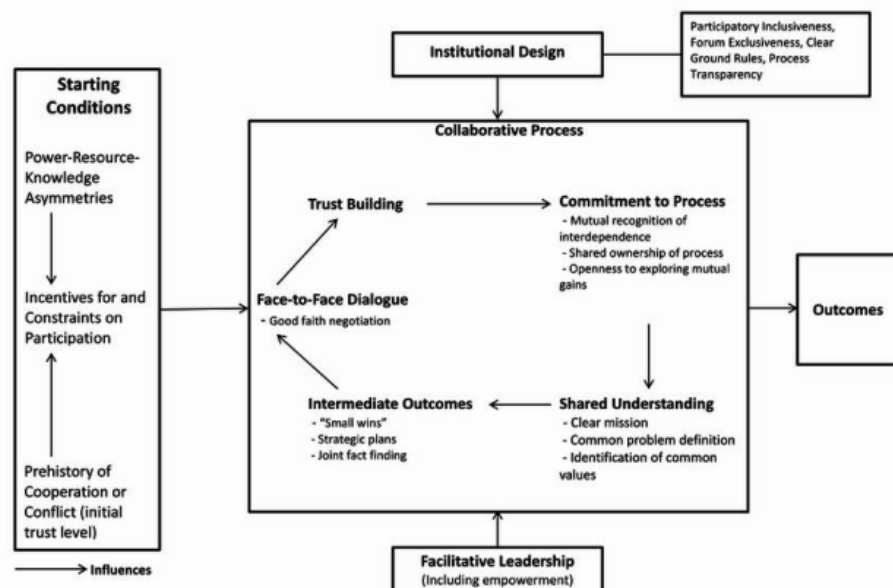
Setiap pemangku kepentingan harus berbagi pemahaman mereka tentang apa yang mereka butuhkan untuk mencapai dalam kerjasama, dalam proses berbagi pemahaman ini, rasa yang kuat dari realisasi tujuan bersama, visi bersama, ideologi dan sebagainya dapat diciptakan.

## 5. Hasil Menengah

Hasil dari proses kolaboratif dapat dicapai dalam bentuk hasil yang nyata, dan ini merupakan bukti nyata proses kritis dan penting dalam mengembangkan momentum yang dapat mendorong keberhasilan kolaborasi. Hasil antara ini bekerja ketika tujuan dapat dicapai dan juga memberikan manfaat kolaborasi.

Kolaborasi ini sangatlah penting karena memang dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan perlu adanya anggaran yang tidak sedikit maka dari terciptalah kolaborasi ini yang mana dapat memudahkan. Dalam collaborative governance sendiri terdapat beberapa dimensi yaitu:

1. Dalam tujuan mencapai sasaran klien terdapat kolaborasi yang juga dapat meningkatkan sumber daya dan juga pelayanan.
2. Jika hubungan antar organisasi meningkat dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan manfaat kolektif dan kolaborasi organisasi yang baik yang berujung dengan peningkatan modal sosial masyarakat yang dilayani. Dalam hubungan organisasi yang berkualitas dapat membantu dalam menghadapi berbagai masalah hingga mendapatkan solusi yang maksimal.
3. Perkembangan yang terjadi di organisasi dapat membawa efek langsung yang lebih baik dan mampu untuk meningkatkan kolaborasi. Dalam konsep collaborative governance terdapat beberapa tahapan kolaborasi, berbagai tahapan



Gambar 1.2 Bagan Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash

ini sangatlah penting untuk memaksimalkan dalam mengurus urusan publik, dalam hal ini memang proses kolaboratif masih sulit untuk dilaksanakan karena memang tiap pemangku kepentingan berbeda-beda sifat dan karakternya

Di zaman yang sudah maju ini, pemerintah juga perlu melakukan berbagai inovasi dalam menentukan efektifitas kebijakan yang ditempuhnya dalam berbagai situasi yang dihadapinya, tentunya perlu ditingkatkan kerjasama antar pihak yang dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi hasil yang dihasilkan, tentu ada kepentingan yang berbeda-beda melibatkan banyak pihak, sehingga diperlukan kerjasama yang teratur disebut *Collaborative Governance*.

Manajemen bersama terdiri dari beberapa aktor yang terlibat ini adalah kerjasama antara, misalnya, pemerintah dan sektor swasta, serta masyarakat. karena itu dalam pertanyaan tentang mendefinisikan kebijakan atau memperluas kerjasama tidak hanya satu pihak membutuhkan pihak lain untuk bekerja sama dengan langkah yang tepat sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam pengelolaan bersama didalam *Collaborative Governance*.

Di antara sekian banyak kajian yang mengangkat topik konsep desa teknologi, perlu dibuat perbandingan yang perlu direkonsiliasi agar bisa melakukannya. Meningkatkan kualitas tulisan saat ini. Dari sekian banyak karya penulis, banyak sekali kelebihan yang bisa dijadikan bahan referensi terhadap penelitian.

## 2. E- Village (Desa Digital)

Menurut Wiswanadham dalam jurnal Institut Teknologi Nasional (2019) mengatakan bahwa Desa berbasis internet ini merupakan layanan yang

menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaannya kegiatan pedesaan yang dikelola secara efektif dan efisien oleh masyarakat pedesaan. Desa cerdas atau smart village merupakan konsep pembangunan dimana masyarakat Desa dalam masyarakat memecahkan masalah daerah dengan Secara arif dan bijaksana menggunakan potensi sumber daya yang dimilikinya dan efektivitas dan promosi adat dan budaya lokal, serta standar berlaku (Baru et al., 2019).

Konsep pembangunan “desa pintar” tidak hanya ditujukan pada implementasi perkembangan teknologi di desa, tetapi mengacu pada perubahan kondisi desa menjadi lebih baik dan berkembang melalui pengelolaan yang maksimal sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan. konsep Smart Village/E-Village merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pengembangan konsep kota pintar. Unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintah di desa, yang juga membutuhkan pengembangan kembali teknologi informasi dan komunikasi Ini adalah bagaimana kita dapat mempercepat pengembangan kota pintar.

Harus ada desain konseptual dasar karakterisasi wilayah desa dalam bidang penerapan teknologi informasi dan komunikasi, Sehingga desa dapat menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai, kepribadian dan standar desa (Herdiana, 2019).

Model pembangunan pedesaan berbasis web menjadi penting di tengah perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi karena, menurut Amien (2005), ketersediaan informasi merupakan “hak asasi” bagi setiap komponen, karena komponen permintaan pada dasarnya membutuhkan informasi yang akurat



dan tepat waktu untuk mengidentifikasi respon. dan memperhatikan kelestariannya, serta meningkatkan kualitas partisipasi dalam membangun sistem.

Dari kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi pembangunan tidak lagi menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih tinggi dari masyarakat yang hanya membentuk model komunikasi “top-down”. Karena di negara dengan sistem politik terbuka seperti Indonesia, sejalan dengan tuntutan dan cita-cita reformasi, pemerintah idealnya memperlakukan rakyat secara setara. Dalam konteks ini, teknologi informasi sumber terbuka (open source) dapat lebih mengedepankan keterbukaan, partisipasi dan pemerataan.

Dengan gaya komunikasi seperti ini, proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan harus melibatkan semua pihak, baik objek maupun pelaku dan fasilitator. Schramm dalam Harun dan Ardianto (2016) merumuskan tugas pokok komunikasi dalam pembangunan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan informasi pembangunan kepada publik sehingga berfokus pada kebutuhan akan perubahan, kemungkinan dan cara pelaksanaan perubahan, sarana perubahan, dan pembentukan aspirasi nasional.
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, memperluas dialog untuk mengikutsertakan semua pihak yang akan mengambil keputusan tentang perubahan, memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan suara masyarakat kurang mampu, dan membuat dialog yang

mulus. Informasi mengalir dari atas ke bawah.

- c. Mengajar tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan, dari orang dewasa hingga anak-anak, dari literasi hingga keterampilan teknis yang mengubah kehidupan masyarakat.

Dengan latar belakang tantangan tersebut, desa harus mampu mendorong munculnya gerakan masyarakat pedesaan yang mencari perbaikan diri dalam menghadapi perubahan teknologi yang begitu pesat. Sementara itu, konsep pembangunan yang dilakukan pemerintah masih berkembang lambat dan bersifat proyek. Akibatnya, kesenjangan informasi semakin melebar, membuat daerah pedesaan semakin terpinggirkan dalam hal akses teknologi komunikasi.

#### G. Definisi Konseptual

##### 1. Collaborative Governance

*Collaborative Governance* dan pekerjaan yang mengatur lebih dari satu lembaga pemerintah untuk berkomunikasi langsung dengannya pemangku kepentingan non-publik dalam langkah pengambilan keputusan bersama yang berorientasi formal dan konsensual dan perdagangan target uraian dan pelaksanaan kebijakan publik, serta pengelolaan program atau aset public. Terdapat beberapa tahapan kerjasama dalam konsep pengelolaan bersama, dan tahapan yang berbeda tersebut sangat penting untuk pengelolaan urusan publik yang maksimal, dalam hal ini proses kerjasama masih sulit untuk dilaksanakan karena padahal, setiap pemangku kepentingan berbeda karakter dan kepribadiannya.

##### 2. E-Village (Desa Digital)

Konsep desa digital yang membutuhkan jaringan informasi dan komunikasi yang sesuai. Desa berbasis internet ini merupakan layanan yang menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaannya kegiatan pedesaan yang dikelola secara efektif dan efisien oleh masyarakat pedesaan. Desa cerdas atau smart village merupakan konsep pembangunan dimana masyarakat Desa dalam masyarakat memecahkan masalah daerah dengan Secara arif dan bijaksana menggunakan potensi sumber daya yang dimilikinya dan efektivitas dan promosi adat dan budaya lokal, serta standar berlaku.

#### H. Definisi Operasional

Menurut Nurdin dan Hartati (2019) definisi operasional adalah identifikasi variabel operasional berdasarkan karakteristik yang dapat diamati yang memungkinkan peneliti melakukan pengamatan atau pengukuran yang akurat terhadap suatu objek atau fenomena. Nurdin dan Hartati (2019) juga menambahkan bahwa proses pendefinisian berarti menggambarkan variable agar variabel hanya memiliki satu nilai, atau itu tidak memiliki makna ganda. Nilai ganda akan mengimbangi variable dan mempengaruhi penelitian yang sedang berlangsung.

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Keterlibatan aktor dalam tahapan Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008)	Dialog Tatap Muka	1. Pemerintah 2. Masyarakat Lokal 3. Swasta
	Membangun Kepercayaan	1. Pemerintah 2. Komunitas Lokal 3. Swasta
	Memberi Pemahaman	1. Pemerintah 2. Komunitas Lokal 3. Swasta

	Komitmen Untuk Menunjang Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah</li> <li>2. Komunitas Lokal</li> <li>3. Media</li> <li>4. Swasta</li> </ol>
	Hasil Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah</li> <li>2. Komunitas Lokal</li> <li>3. Media</li> <li>4. Swasta</li> </ol>

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk menggambarkan masalah yang diteliti dan mengintegrasikan data secara objektif di penelitian. Pencarian data menggunakan website resmi, jurnal, buku akan dilakukan untuk mendapatkan data yang benar dan sesuai kebutuhan. Diharapkan dengan melakukan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh metadata guna mengidentifikasi penyebab dan proses yang terjadi di lapangan.

Penjelasan studi kasus adalah desain penelitian ekstensif, terperinci, mendalam dan banyak lagi diarahkan sebagai upaya untuk mempelajari masalah atau fenomena yang ada modern (waktu operasi). Pertimbangkan menggabungkan dua Rancangan penelitian didasarkan pada pendapat Hanurawan (2016), yang Ini menyatakan bahwa studi kasus dapat dikombinasikan dengan model atau proyek penelitian lainnya seperti etnografi dan fenomenologi. Penggabungan rancang studi kasus dengan desain virtual berkat penelitian ini ini disebabkan oleh sifat pengalaman individu yang terkait dengan fenomena tersebut. Penggunaan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini dikarenakan untuk dapat mendeskripsikan data yang diperoleh dari objek penelitian terkait yaitu

Kampung Cyber, Patehan, Kraton, DIY yang melakukan, membuat dan berpartisipasi dalam melahirkan inovasi dan strategi terkait model untuk menciptakan masyarakat melek teknologi dalam merespon society 5.0.

## **2. Unit Analisa**

Unit analisisnya adalah Komunitas local yang ada di Kampung Cyber, Patehan, Kraton, DIY. Semua kerjasama atau sinergi yang dilaksanakan oleh komunitas lokal terkait dengan pemerataan informasi atau Pendidikan yang menyebarluaskan terkait penggunaan teknologi di Kampung Cyber untuk menunjang kualitas masyarakat kampung tersebut. Juga beserta media massa yang meliput berita terkait pengembangan Kampung Cyber tersebut dan sumber Pustaka lainnya.

## **3. Data dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data hasil wawancara penulis dengan beberapa orang dari komunitas local yang ada di Kampung Cyber, Data mentah adalah semua informasi yang berkaitan dengan apa yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan subjek penelitian, Data Primer (data mentah) adalah objek atau dokumen asli, sumber bahan subjek, disebut informasi langsung.

Berikut data narasumber wawancara pada penelitian ini :

Tabel 1.2 Daftar Narasumber Wawancara dan Data Yang Diperoleh

No	Nama	Jabatan	Data yang diperoleh
1	Antonius Sasongko	Ketua RT 36/RW 09 Kelurahan Patehan	Informasi keterlibatan Pemerintah Desa dalam upaya pembangunan Kampung Cyber

2	Idha Prihantini	Sekretaris Lurah Patehan	Informasi keterlibatan Kelurahan Patehan dalam upaya pembangunan Kampung Cyber
3	Pak Supri	Tur Guide	Informasi perihal dampak dari keterlibatan dalam pengelolaan Kampung Cyber
4	Antonius Sasongko	Tokoh Komunitas Kampung Cyber	Informasi perihal dampak dari keterlibatan dalam pengelolaan Kampung Cyber
5	Suciati Sah	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi keterlibatan Kelurahan Patehan dalam upaya pembangunan Kampung Cyber
6	Ibu Pembatik	Masyarakat	Informasi perihal dampak dari keterlibatan dalam pengelolaan Kampung Cyber

## 2. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah dokumen pendukung berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen pemerintah desa yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis data sekunder, karena beberapa data tersebut dapat saling melengkapi. Data ditambahkan pada data sekunder sesuai dengan data yang diperoleh selama penelitian.

## 4. Teknik Penumpulan Data

### 1. Observasi Sistematis

Pengamatan sistematis adalah pengamatan dengan pemilihan sistematis faktor-faktor yang diamati, menunjukkan kategorinya. Dengan kata lain, ruang lingkup materi kontrol ditentukan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sebagai aturan, pemantauan rutin dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, mereka juga dilengkapi

dengan alat pencatat elektronik.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh melalui fakta-fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, data tertulis, arsip, foto, video, catatan kegiatan, dan lain-lain, yang tentunya diperoleh dari komunitas local yang ada di Kampung Cyber. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk menyempurnakan data observasi dan wawancara dalam validasi data. dokumentasi adalah catatan peristiwa. Sebelumnya, ini bisa berupa huruf, gambar, atau karya. seorang pria besar. Peneliti menggunakan data konsumen dan data penjualan. Dokumentasi berupa gambar dengan konsumen sebagai data sekunder dalam penelitian.

## 3. Wawancara

Untuk memperoleh data yang akurat, wawancara dengan informan diperlukan untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya mengenai permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini. Teknik wawancara dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam, karena metode wawancara ini berfungsi untuk memperoleh informasi guna bertanya dan menjawab pertanyaan, serta tatap muka antara pewawancara dan informan. Kami membuat interpretasi dan menarik kesimpulan. Berikut beberapa informan yang diwawancarai oleh penulis selama penelitian :

Tabel 1.3 List Nama Narasumber Wawancara

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Antonius Sasongko	Ketua RT 36/RW 09 Kelurahan Patehan	1
2	Idha Prihantini	Sekretaris Lurah Patehan	1

3	Pak Supri	Tur Guide	1
4	Antonius Sasongko	Tokoh Komunitas Kampung Cyber	1
5	Suciati Sah	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	1
6	Masyarakat	Pengerajin Batik, Penjual Omah Pancing	2

Tabel 1.4 Waktu dan Tempat Wawancara

No	Instansi	Tanggal	Tempat
1	Pemerintah Desa	27 Januari 2023	Kantor Desa
2	Kelurahan	27 Januari 2023	Kantor Kelurahan Patehan
3	Kelompok Masyarakat	30 Januari 2023	Kediaman Ketua RT 36/RW 09
4	Kelompok Masyarakat	30 Januari 2023	Kawasan Kampung Cyber
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	24 Januari 2023	Kantor Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian
6	Masyarakat	30 Januari 2023	Kampung Cyber

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2018), ada tiga metode dalam menganalisis data kualitatif, yaitu pengolahan data, penyajian data, dan pembuatan inferensi. Proses ini berlanjut selama penelitian, bahkan sebelum data aktual dikumpulkan

### a. Reduksi Data

Pengolahan data merupakan salah satu metode untuk menganalisis data kualitatif. Minimisasi data adalah suatu bentuk analisis yang menyaring,



mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang, dan mengatur data yang tidak perlu sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pasti.

b. Penyajian Data

data merupakan salah satu metode analisis data kualitatif. Penyajian data adalah tindakan yang terjadi ketika mengumpulkan sekumpulan informasi yang memungkinkan ditariknya kesimpulan. Format penyajian data yang berkualitas berupa teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, kisi-kisi dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan salah satu metode analisis data kualitatif. Menarik kesimpulan merupakan analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Menurut Vocabulary Kesimpulan berarti bagian terakhir dari sesuatu, akhir atau kesimpulan, jadi ketika kami menulis esai, pada bagian akhir penulis akan menyimpulkan apa yang menjadi hasil penelitiannya